

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K J I P)



**DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
Kabupaten Wonosobo
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 telah selesai disusun. LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP berisi pengukuran kinerja sasaran yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. LKjIP yang telah disusun semoga bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, menjadi pedoman untuk lebih meningkatkan dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Pebruari 2023

Kepala Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo



DR. Drs. MUSOFA, M.Pd

NIP. 19680104 199702 1 002

DAFTAR ISI

HAL

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1-3
1.2. Gambaran Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.....	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis tahun 2021 - 2026.	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	11
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022.....	12
2.4. Perjanjian Kinerja (PK).....	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.	18
3.2. Realisasi Anggaran	23
BAB IV : PENUTUP	32
4.1. Kesimpulan	32
4.2. Rekomendasi dan Saran	33
DAFTAR TABEL	iv

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Arpusda	10
Tabel 2.1.2 : Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026	11
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026	12
Tabel 2.3 : Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2022.....	13
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2022	16
Tabel 3 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
Tabel 3.1.1 : Pengukuran Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	18
Tabel 3.1.2 : Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.....	19
Tabel 3.1.3 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	20
Tabel 3.1.4 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Tahun Sebelumnya.....	21
Tabel 3.2.1 : Realisasi Anggaran Tahun 2022	24
Tabel 3.2.2 : Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobon Tahun 2022	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu bentuk pembangunan manusia dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia, bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan Daerah mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagai pusat sumber belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Sekarang Perpustakaan sudah bertransformasi menjadi **Pusat Belajar dan Berkegiatan Masyarakat**. Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar perpustakaan pada tahun 2022 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah selaku *leading sector*. Program - program yang ada di Dinas Arpusda khususnya urusan Perpustakaan mendukung misi Bupati Wakil Bupati terpilih yaitu “ *Mewujudkan kualitas*

sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang beorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern” yang bertujuan “Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing” serta sasaran yang diharapkan yaitu “ Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial”.

Bagi pemerintah daerah, arsip merupakan rekaman informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bukti otentik, sumber informasi, memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban, sehingga arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Tertib arsip merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah sehingga perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis TIK. Selain sebagai referensi, bukti kegiatan, maupun pilar dalam proses administrasi, arsip juga merupakan bukti akuntabilitas, transparansi, produktivitas kinerja, perlindungan kepentingan dan hak-hak keperdataan rakyat serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar kearsipan pada tahun 2022 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah selaku *leading sector* yang mendukung misi Bupati Wakil Bupati terpilih yaitu *“Mendukung kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”* yang bertujuan *“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan*

*publik” serta sasaran yang ingin dicapai adalah “
Terwujudnya pemerintahan yang kapabel”.*

1.2 Gambaran Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo di bidang Kearsipan dan Perpustakaan, bidang kearsipan dan perpustakaan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo 2021 – 2026, sebagai acuan dasar dalam menyusun rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. pembinaan dan pengembangan tenaga khusus arsiparis, pustakawan dan tenaga teknis lain;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

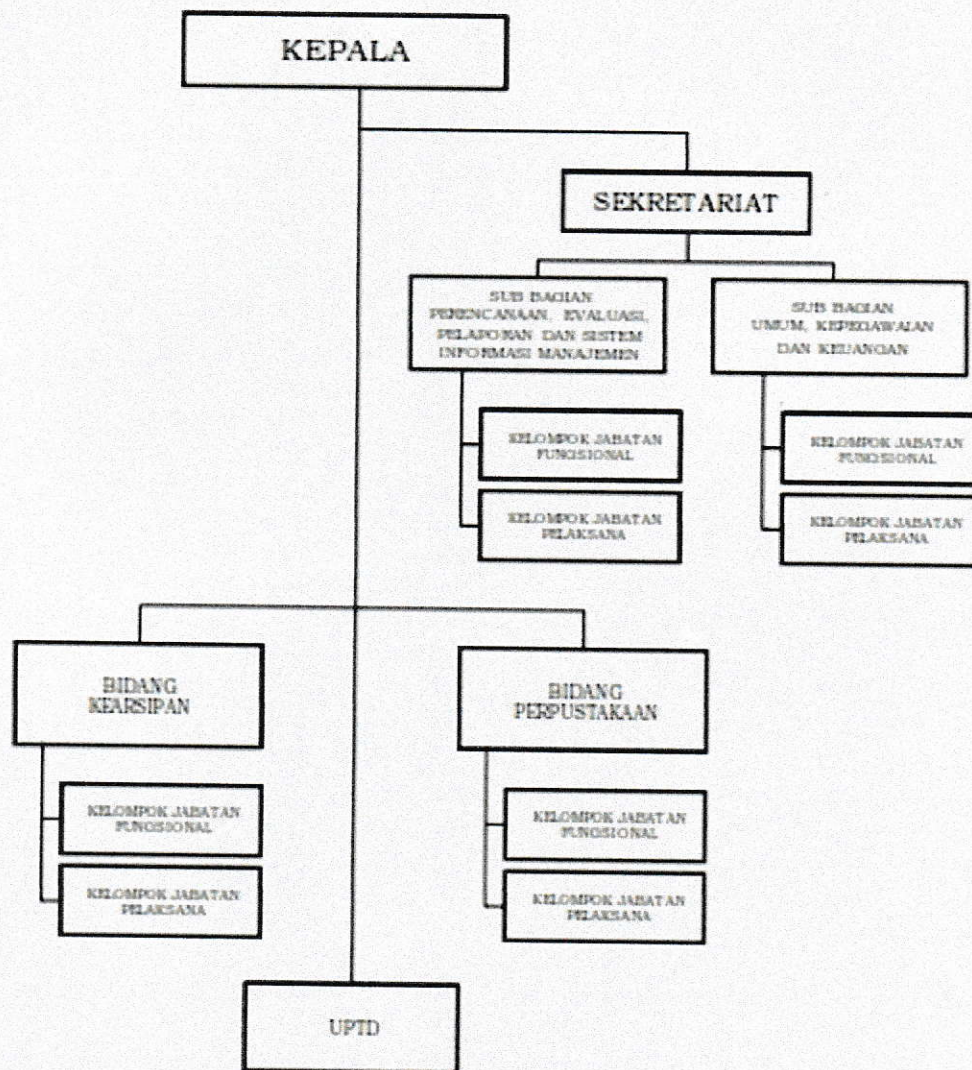
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Kearsipan;
- d. Bidang Perpustakaan;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2022, tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo seperti berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 25 TAHUN 2022

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 sejumlah 26 orang terdiri dari :

Laki laki : 16 orang

Perempuan : 10 orang.

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menurut pendidikan sebagai berikut :

▶	S3	:	1	Orang
▶	S2	:	2	Orang
▶	S1	:	8	Orang
▶	Sarjana Muda	:	9	Orang
▶	SLTA	:	5	Orang
▶	SLTP	:	-	Orang
▶	SD	:	1	Orang
	Jumlah	:	26	Orang

Sedangkan menurut golongan ruang gaji, adalah sebagai berikut :

▶	Golongan IV	:	5	Orang
▶	Golongan III	:	13	Orang
▶	Golongan II	:	7	Orang
▶	Golongan I	:	1	Orang
	Jumlah	:	26	Orang

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi

BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo masuk ke dalam 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan perpustakaan diterjemahkan dalam misi 3 (tiga) yaitu : “ Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern” yang bertujuan “ Meningkatkan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup ” dengan sasaran “ Menguatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ”. Sedang urusan kearsipan diterjemahkan dalam misi 1 (satu) yaitu : “ Mendukung kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat ” yang bertujuan “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik” serta sasaran yang ingin dicapai adalah “ Terwujudnya pemerintahan yang kapabel ”.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran.

Tahun 2022 merupakan tahapan ke-2 dalam satu masa periode pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tahun

2021-2026, tujuan dan sasaran merupakan turunan visi dan misi Bupati Wonosobo dalam RPJMD 2021-2026. Agar pencapaian tujuan dan sasaran jelas maka perlu dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program dan indikator kegiatan. IKU akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan harus ada hubungan hirarkhis dan logis yang menggambarkan struktur kinerja yang sistematis (*cascading*). *Cascading* merupakan hasil analisis perumusan pohon permasalahan Dinas Arpusda yang menggambarkan masalah pokok, masalah, sub-masalah yang saling terkait dan bersifat strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Output dan Outcome yang jelas dan terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sesuai dokumen perencanaan maka tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Urusan Kearsipan adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Urusan Perpustakaan adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Literasi Masyarakat. Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.1

Tabel 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Arpusda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Indeks kualitas pengelolaan arsip
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Literasi Masyarakat	Menguatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat
3	Meningkatkan pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
4	Meningkatkan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam jangka menengah 5 (lima) tahun adalah meningkatkan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan akses dan layanan arsip dan peningkatan pelestarian pengembangan dan pemanfaatan arsip, serta meningkatkan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau melalui transformasi layanan perpustakaan yang inklusif dan pemerataan layanan perpustakaan untuk membangun kesadaran literasi. Rumusan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan sebagaimana pada tabel 2.1.2

Tabel 2.1.2 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Meningkatkan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas pelayanan Publik melalui peningkatan akses dan layanan arsip dan peningkatan upaya pelestarian pengembangan dan pemanfaatan arsip	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Literasi Masyarakat	Menguatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau melalui transformasi layanan perpustakaan yang inklusif dan pemerataan layanan perpustakaan untuk membangun kesadaran literasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
Meningkatkan pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	-	-

2.2 Indikator Kinerja Utama

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan . Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya

adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Indeks kualitas pengelolaan arsip	Bidang Kearsipan
2	Menguatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Bidang Perpustakaan
3	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Indeks kepuasan Masyarakat	Sekretariat
4	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sekretariat

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022

Rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Skor	66,42
2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Indeks kualitas pengelolaan arsip	Persen	98 %
4	Menguatnya indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Persen	28,71%

Rencana kinerja di atas menggambarkan target kinerja yang harus dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dalam tahun 2022. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode tahun 2022.

2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Permenpan No. 53 Th 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan

oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dengan Bupati. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati merupakan indikator target kinerja pada tahun yang bersangkutan dan harus sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja , Rencana Strategis dan RPJMD. Target kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang harusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dokumen perencanaan Rencana Strategis. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja (PK) adalah :

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 2021-2026 terdapat 4 (empat) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Pengelolaan Arsip
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program Pembinaan Perpustakaan
 4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- Program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah untuk mewujudkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun 2022, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo. Target kinerja meliputi 4 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 6.071.906.816,00 terdiri dari :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri 4 kegiatan 14 subkegiatan;
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan terdiri 2 kegiatan 4 subkegiatan
 - c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terdiri 1 kegiatan 1 subkegiatan
 - d. Program Pengelolaan Arsip terdiri 2 kegiatan 2 subkegiatan.

Adapun Perjanjian Kinerja tertera pada tabel berikut :

Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	66,42
2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Indeks kulaitas pengelolaan arsip	98 %
4	Menguatnya indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	28,71
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Arsip	227.090.000	-
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.011.134.216	-
3	Program Pembinaan Perpustakaan	806.703.600	-
4	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	26.979.000	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berakhirnya tahun anggaran, setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi capaian kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3) :

Tabel 3 Skala Pengukuran
Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Katagori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Tinggi
2	75% s.d 100%	Tinggi
3	55% s.d 74%	Sedang
4	Kurang dari 55%	Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo. Pengukuran rencana kinerja yang terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1 Pengukuran Kinerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	66,42	66,47	100,075	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,316	107,61	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Indeks kulaitas pengelolaan arsip	98 %	82,62	84,31	Tinggi
4	Menguatnya indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	28,71	55,44	193,10	Sangat Tinggi
	Rata - Rata Capaian				121,44	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 yang diukur berdasarkan 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar **121,44%**, maka capaian kinerja dikategorikan "**Sangat Tinggi**". Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator perjanjian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip. 2. Menguatnya indeks pembangunan literasi masyarakat. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 2 indikator, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Indeks kualitas pengelolaan arsip	98 %	82,62	84,31	Laporan Hasil Audit ANRI (ASKE)
2	Menguatnya indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	28,71	55,44	193,10	Kajian Pembangunan Literasi Masyarakat dari Perpustakaan RI
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	66,42	66,47	100,075	Sumber Inspektorat
4	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,316	107,61	Penilaian Mandiri

Dari 4 indikator kinerja terlihat ada 1 capaian kinerja yang tidak tercapai yaitu Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip dan 3 capaian kinerja yang melebihi target yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2022, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut;

a. Perbandingan kinerja tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		%Capaian	
			2022	2021	2022	2021
1	Indeks kualitas pengelolaan arsip	98 %	82,62	97,23	84,31	97,23
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	28,71	55,44	26,55	193,10	26,55
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	66,42	66,47	63,34	100,075	63,34
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,316	82,46	107,61	82,46

Dilihat dari capaian tahun lalu terlihat bahwa capaian kinerja tahun ini ada yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan ada yang menurun khususnya Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip dikarenakan perubahan aturan Perka ANRI No. 6 Tahun 2019 yang mengharuskan obyek pengawasan kearsipan 60% OPD dan 40% LKD.

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2022 ada yang mengalami peningkatan dan ada yang menurun , terutama dalam memenuhi persyaratan pengawasan kearsipan dari ANRI . Adapun rincian realisasi tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2021	2020
1	Indeks kualitas pengelolaan arsip	82,62	97,23	98,63
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	55,44	26,55	25,74
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	66,47	64,50	63,34
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,316	82,46	81,81

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Tahun 2022 adalah tahun kedua RPJMD 2021-2026 sehingga target kinerja tahun 2022 dan tahun mendatang masih ada upaya yang serius untuk mencapai target yang ditargetkan hingga target akhir RPJMD.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Berdasarkan beberapa data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa capaian kinerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Daerah tahun 2022 ada kinerja yang melampaui dan turun dari target yaitu :

- 1) Indeks pembangunan literasi masyarakat naik dari target Realisasi capaian mencapai 55,44% dari target 28,71% tercapai 193,10%. Naik karena fasilitas di Arpusda khususnya bidang perpustakaan semakin lengkap dan pembinaan ke perpustakaan desa maupun sekolah didukung oleh 15 orang pendamping perpustakaan di tiap kecamatan.
- 2) Indeks kualitas pengelolaan arsip 82,62% turun 84,31 dari target 98%, karena adanya perubahan aturan yang mengharuskan pengawasan 60% OPD dan 40% LKD (Arpusda). Khususnya di OPD masih banyak kekurangan atau pengelolaan arsipnya belum standar sehingga perlu komitmen para pimpinan dalam pengelolaan kearsipan di masing - masing OPD.
- 3) Nilai Evaluasi Akuntabilitas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan hal ini dikarenakan terus melakukan perubahan dalam semua aspek SAKIP mulai dari kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi sampai dengan memastikan capaian kinerja sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Disamping itu pemahaman tentang SAKIP di berikan pada tiap-tiap personil untuk menumbuhkan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan masing-masing individu.
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat Realisasi capaian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini karena Dinas Arpusda telah meningkatkan layanan perpustakaan dan kearsipan dengan penambahan modul pada aplikasi online / digitalisasi sehingga mempermudah layanan, disamping komitmen

karyawan Dinas Arpusda memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya.

e. **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

IKM dan SAKIP ditunjang dengan program penunjang urusan daerah sehingga ada kegiatan yang mendukung pencapaian nilai IKM dan SAKIP antara lain adalah adanya kegiatan rapat rutin untuk mengevaluasi dan melakukan pengukuran kinerja di masing bidang dan individu. Indeks kualitas pengelolaan arsip ditunjang dengan program Pengelolaan Arsip, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sedang Indeks pembangunan literasi masyarakat ditunjang dengan program Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022 didukung alokasi anggaran sebesar Rp. **6.050.488.838** yang digunakan untuk melaksanakan 4 program, 9 kegiatan dan 21 subkegiatan. Alokasi anggaran secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut :

Tabel. 3.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.989.716.238	4.465.649.663	89.50
2	Program Pengelolaan Arsip	227.090.000	223.289.642	98.33
3	Program Pembinaan Perpustakaan	806.703.600	788.006.398	97.68
4	Program Pelestarian Koleksi Nasioal dan Naskah Kuno	26.979.000	26.438.400	98.00
	Jumlah	6.050.488.838	5.503.384.103	90,96

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Arpusda Kabupaten Wonosobo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Arpusda Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.2 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobon Tahun 2022

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83	4.989.716.238	89,316	4.465.649.663	107,61	89,50
		Nilai SAKIP	66,42		66,47		100,07	
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100	3.843.027.558	100	3.377.580.108	100	87,4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan gaji dan tunjangan ASN	100	3.843.027.558	100	3.377.580.108	100	87,89
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100	196.300.000	100	190.667.260	100	97,13
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	10.000.000	100	10.000.000	100	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100	28.000.000	100	28.000.000	100	100

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak yang tersedia dan Penggandaan yang disediakan	100	20.000.000	100	19.997.167	100	99,99
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100	28.800.000	100	24.417.600	100	84,78
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	109.500.000	100	108.252.493	100	98,86
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	90.000.000	100	80.5100.00	100	89,46
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	90.000.000	100	80.510.000	100	89,46
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	700.877.280	100	658.587.748	100	93,97

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	100	4.127.280	100	1.509.950	100	36,58
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	138.500.000	100	103.924.556	100	75,04
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	35.000.000	100	34.834.720	100	99,53
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	523.250.000	100	518.318.522	100	99,06
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	159.511.400	100	158.304.547	100	99,24

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	66.261.400	100	66.248.067	100	99,98
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	5.000.000	100	4.500.000	100	90
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya yang Dipelihara	100	28.250.000	100	27.556.980	100	97,55
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	100	60.000.000	100	59.999.500	100	100
B	Program Pengelolaan Arsip	Indeks kualitas pengelolaan arsip	98	227.090.000	82,62	223.289.642	84,31	98,33
I	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perawatan Arsip Daerah		207.090.000		203.316.142		98,18
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip yang dikelola dan terselamatkan		207.090.000		203.316.142		98,18

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Kearsipan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)		20.000.000		19.973.500		99,87
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah		20.000.000		19.973.500		99,87
C	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat	28,71	833.682.600	55,44	814.444.798	193,10	97.68
I	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan		719.203.600		705.774.026		98,13
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik		24.000.000		23.749.000		99,95
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Perpustakaan Transformasi		588.152.000		575.790.356		97,90
3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Cetak / digital		107.051.600		106.234.670		99,24

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan perpustakaan		87.500.000		82.232.372		93,98
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi		87.500.000		82.232.372		93,98
D	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan naskah kuno yang diakuisisi atau dialih media (digitalisasi) atau terdaftar yang ada di wilayahnya		26.979.000		26.438.400		98,00
		Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa						
		Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)						

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi Naskah kuno yang dikelola dan dialihmedia		26.979.000		26.438.400		98,00
1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang diidentifikasi		26.979.000		26.438.400		98,00

Berdasarkan tabel 3.2.2 bahwa dari total pagu anggaran belanja langsung setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp. 6.050.488.838,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **5.503.384.103,-** atau dengan capaian realisasi sebesar **90,96%**. Persentase penyerapan belanja anggaran pada Tahun 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penyerapan belanja anggaran Tahun 2021 dengan tingkat persentase 95,74%. Adapun penyebabnya khususnya di anggaran gaji dan tunjangan kinerja (Tamsil) yang tidak terserap maksimal karena ada beberapa ASN yang pensiun di tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode mendatang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diwajibkan dan perlukan baik tingkat nasional maupun daerah.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi yang tertera di Renstra dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah - langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan perkembangan isu - isu strategis di bidang kearsipan dan perpustakaan
2. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan analisa satuan barang dan kebutuhan sehingga belanja yang direncanakan dapat terserap maksimal.
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (ANRI, Perpustnas), mengingat adanya beberapa kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo yang terkait langsung dengan instansi pusat.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Drs. MUSOFA, M.Pd.

Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo.

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Jabatan : Bupati Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2022

Pihak Kedua,



H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Pihak Pertama,



DR. Drs. MUSOFA, M.Pd.
NIP. 19680104 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	66,42
2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Indeks kulaitas pengelolaan arsip	98 %
4	Menguatnya indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	28,71

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Arsip	Rp. 227.090.000	-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.139.441.074	-
3. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 752.703.600	-
4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 26.979.000	-
JUMLAH	Rp. 6.146.213.674	

Wonosobo, Januari 2022

Bupati Wonosobo,



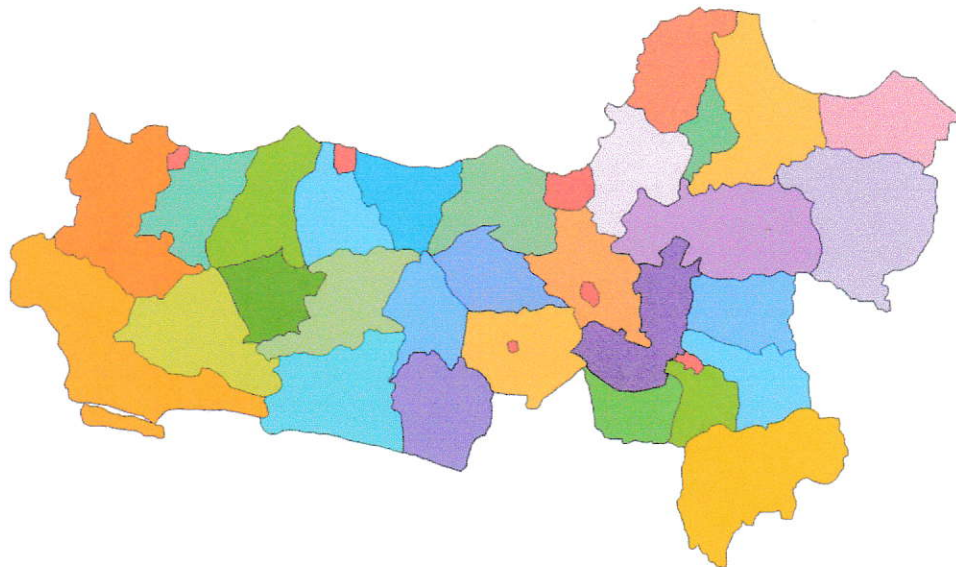
H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Kepala Dinas Kearsipan
Dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo



DR. Drs. MUSOFA, M.Pd.
NIP.19680104 199702 1 002

LAPORAN AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL KABUPATEN WONOSOBO



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2022**

BAB III
REKAPITULASI NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI	NILAI STANDAR	SKOR	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN	BOBOT ASPEK	NILAI ASPEK
I.	ASPEK KEBIJAKAN	1810	2100	0,86		87,14	0,3	26,14
A.	PEMENUHAN	1340	1400	0,96	0,7	67,00		
B.	REFORM	470	700	0,67	0,3	20,14		
II.	ASPEK PEMBINAAN	880	1300	0,68		68,80	0,2	13,76
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN	560	800	0,70	0,8	56,00		
B.	REFORM	320	500	0,64	0,2	12,80		
III.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN	1710	1900	0,90		90,50	0,1	9,05
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN	1610	1800	0,89	0,9	80,50		
B.	REFORM	100	100	1,00	0,1	10,00		

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI	NILAI STANDAR	SKOR	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN	BOBOT ASPEK	NILAI ASPEK
IV.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2630	3100	0,85		86,59	0,2	17,32
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS	1990	2200	0,90	0,8	72,36		
B.	REFORM	640	900	0,71	0,2	14,22		
V.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2530	3100	0,82		81,74	0,2	16,35
A.	KEWAJIBAN PEMENUHAN SDK	2360	2900	0,81	0,9	73,24		
B.	REFORM	170	200	0,85	0,1	8,50		
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ SKOR		9560	11500	0,83	NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN			82,62
					KATEGORI			A (MEMUASKAN)

Mengetahui
 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

 SUMARNO SE. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 8 Agustus 2022
 KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

 EDY SUPRIYANTA, ATD. S.H. M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650504 198803 1 014

LAPORAN AKHIR KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

TAHUN 2022



Disusun oleh :



PT. WAHANA DATA UTAMA

Graha Nurul Jl. Terapi Raya Blok AE No.1 Bumi Menteng Asri - Bogor

T : 62-251 7552099 E : wahanadata@yahoo.com W : wahanadata.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga kami, PT. Wahana Data Utama dapat menyusun Laporan Akhir kegiatan “Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022” dengan baik.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Kajian dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pelaksanaan kajian IPLM Tahun 2022 mengacu pada “Pedoman Pengukuran indeks Pembangunan Literasi Masyarakat” yang diterbitkan pada tahun 2021. Hasil kajian IPLM ditampilkan dengan tabulasi data yang terdiri dari pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, pemerataan koleksi perpustakaan, pemerataan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan pemustaka, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan jumlah pemustaka. Kajian IPLM tahun 2022 akan menghasilkan nilai IPLM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

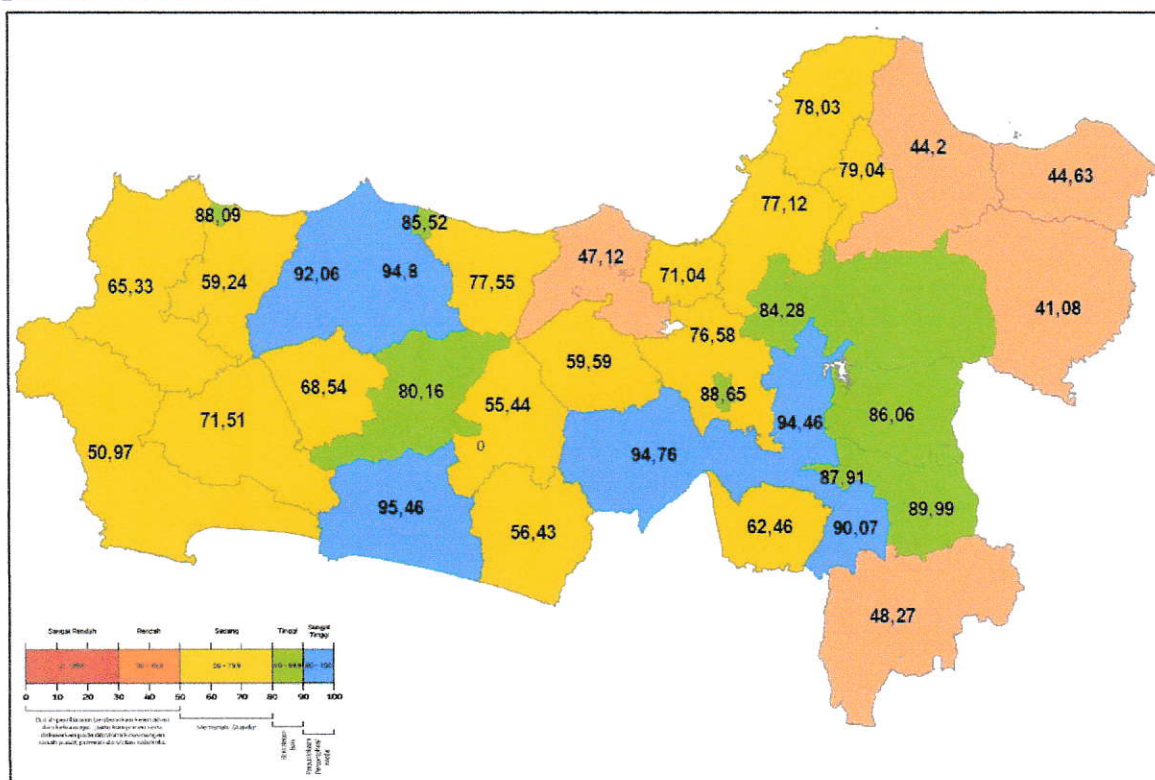
Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Perpustakaan Nasional RI yang telah memberi kesempatan kepada kami sebagai Konsultan Pelaksana Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Bogor, November 2022

PT. Wahana Data Utama

4.1.13. Provinsi Jawa Tengah

Hasil IPLM per Kab/Kota provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 4.14 Peta sebaran IPLM Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kab/Kota. Rekapitulasi UPLM per Kab/Kota seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Rekapitulasi UPLM per Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

No	KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
1	Kab. Banjarnegara	0,0031	2,0153	0,0046	0,1940	2,3668	0,2680	0,7597	80,16
2	Kab. Banyumas	0,0027	1,5680	0,0027	0,2821	2,5470	0,1610	0,4425	71,51
3	Kab. Batang	0,0075	1,7893	0,0057	0,3228	2,3322	0,4154	0,5555	77,55
4	Kab. Blora	0,0028	0,1521	0,0053	0,2910	1,5899	0,1323	0,7023	41,08
5	Kab. Boyolali	0,0038	2,7683	0,0063	0,3152	2,4608	0,2246	0,8334	94,46
6	Kab. Brebes	0,0016	1,0160	0,0020	0,2600	2,8115	0,1850	0,2969	65,33
7	Kab. Cilacap	0,0017	0,9383	0,0050	0,1904	1,5179	0,3034	0,6113	50,97
8	Kab. Demak	0,0022	1,3207	0,0049	0,5918	2,4345	0,3412	0,7031	77,12
9	Kab. Grobogan	0,0022	3,7882	0,0055	0,1997	1,5078	0,0472	0,3492	84,28
10	Kab. Jepara	0,0018	0,9325	0,0021	0,1954	2,6150	0,8632	0,8520	78,03
11	Kab. Karanganyar	0,0113	1,8005	0,0086	0,6025	2,6531	0,4786	0,7447	89,99

No	KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
12	Kab. Kebumen	0,0060	1,6332	0,0073	0,6251	2,3382	1,2421	0,8301	95,46
13	Kab. Kendal	0,0020	0,7176	0,0029	0,3835	1,5956	0,1225	0,4742	47,12
14	Kab. Klaten	0,0027	1,2073	0,0011	0,2920	2,4667	0,1830	0,2194	62,46
15	Kab. Kudus	0,0019	1,6024	0,0083	0,3461	2,6573	0,1626	0,7544	79,04
16	Kab. Magelang	0,0029	2,5739	0,0100	0,3335	2,4576	0,4419	0,8134	94,76
17	Kab. Pati	0,0014	0,9680	0,0017	0,1259	1,6577	0,1183	0,2212	44,20
18	Kab. Pekalongan	0,0027	1,9921	0,0039	0,2223	2,6716	0,2738	1,4698	94,80
19	Kab. Pemalang	0,0021	2,5486	0,0040	0,4101	2,1899	0,2388	1,0510	92,06
20	Kab. Purbalingga	0,0041	1,3335	0,0045	0,3652	2,2975	0,0848	0,7082	68,54
21	Kab. Purworejo	0,0032	1,5074	0,0046	0,3403	1,6128	0,0315	0,4503	56,43
22	Kab. Rembang	0,0029	0,8949	0,0095	0,2856	1,5426	0,0625	0,3263	44,63
23	Kab. Semarang	0,0030	1,2491	0,0022	0,5008	2,8141	0,3286	0,4628	76,58
24	Kab. Sragen	0,0037	1,7298	0,0042	0,3844	2,7660	0,3134	0,8223	86,06
25	Kab. Sukoharjo	0,0029	2,1105	0,0041	0,2817	2,9834	0,1463	0,7764	90,07
26	Kab. Tegal	0,0031	0,4757	0,0030	0,3389	2,7919	0,1701	0,3642	59,24
27	Kab. Temanggung	0,0022	1,9450	0,0034	0,1533	1,7614	0,1449	0,1612	59,59
28	Kab. Wonogiri	0,0029	0,8638	0,0013	0,4337	1,4516	0,3173	0,3086	48,27
29	Kab. Wonosobo	0,0021	1,2611	0,0043	0,2228	1,8061	0,1052	0,4793	55,44
30	Kota Magelang	0,0044	1,9967	0,0025	0,3377	3,1339	0,1748	1,3179	99,54
31	Kota Pekalongan	0,0057	1,5931	0,0043	0,4519	3,1686	0,1514	0,6111	85,52
32	Kota Salatiga	0,0023	2,3112	0,0068	0,2592	2,3264	0,2582	1,0411	88,65
33	Kota Semarang	0,0043	1,0889	0,0093	0,5230	2,4619	0,2515	0,6342	71,04
34	Kota Surakarta	0,0034	1,7975	0,0028	0,2742	2,7550	0,6076	0,7130	87,91
35	Kota Tegal	0,0034	1,9189	0,0000	0,3620	2,9017	0,1933	0,7870	88,09
	Provinsi Jawa Tengah	0,0033	1,5831	0,0045	0,3342	2,3270	0,2727	0,6471	73,89

Pencapaian nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah sebesar **73,89** dan masuk ke dalam **Kategori Sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Magelang 99,54, Kab. Kebumen 95,46, Kab. Pekalongan 94,8. Sedangkan, tiga Kab/kota yang terendah yaitu Kab. Rembang 44,63, Kab. Pati 44,2, Kab. Blora 41,08.

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		: 73,89
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,0033
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	: 1,5831
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,0045
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	: 0,3342
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 2,3270
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	: 0,2727
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	: 0,6471

**Jumlah Penduduk
(BPS 2020)**

36.516.035

Jumlah Penduduk Usia Sekolah

(Kemendikbud dan BPS 2022)

6.286.520

Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi

(BPS 2022)

768.217

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
1	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	: 0,0001	Terdapat 9 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	: 0,0022	Terdapat 217 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan tinggi	: 0,0020	Terdapat 201 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi
2	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	: 53,72%	Terdapat 53,72% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3	Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	: 0,0222	Belum Memenuhi
4	Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	: 71.411.796	Kekurangan koleksi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 71.411.796
5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	: 1: 44.424	1 tenaga perpustakaan melayani 44.424 penduduk
6	Tingkat kemanfaatan perpustakaan	: 0,54%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 0,54%, belum ideal.
7	Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan	: 5,89%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebanyak 5,89%
8	Tingkat Engagement Anggota Perpustakaan	: 2,81%	Terdapat 2,81% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
3. Tujuan.....	2
4. Metode Survey	2
5. Tim Survey.....	2
6. Jadwal Survey	3
B. ANALISA	3
C. PENUTUP	8
1. Kesimpulan.....	8
2. Saran dan Rekomendasi	8

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melaksanakan reformasi birokrasi. Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat.

Bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis. Layanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu upaya perbaikan layanan publik yaitu di satuan kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Satuan kerja ini dalam melakukan perbaikan layanan diawali dengan melakukan evaluasi terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di SKPD ini. Evaluasi yang berwujud pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu tingkat kepuasan pelanggan (masyarakat) dalam memperoleh layanan publik menjadi acuan penting untuk menilai kesungguhan pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, prinsip pelayanan yang mencakup: mudah, transparan dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar menjadi kenyataan yang ditemui masyarakat ketika mereka ingin mendapatkan layanan pemerintah.

Selama ini upaya perbaikan layanan yang dilakukan belum melibatkan assessment kebutuhan perbaikan terlebih dahulu. Sehingga perbaikan layanan terkesan dalam bentuk tindakan-tindakan sporadis yang biasa saja tidak sesuai kebutuhan. Untuk itu pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sebagai bagian dari assessment atas kebutuhan perbaikan menjadi hal yang tidak hanya perlu dilakukan melainkan juga penting. Perlu karena dinamika selera dan preferensi pelanggan dalam hal ini masyarakat selalu berkembang. Sehingga perlu upaya-upaya untuk melakukan penyesuaian berdasarkan karakteristik selera pasar yang berkembang. Dalam rangka penyesuaian itu harus ada indentifikasi kritis dalam bentuk feed back dari pelanggan langsung. Penting karena pelayanan publik harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas yang dimaksud adalah ketercapaian indikator-indikator mutu, sedangkan kuantitas yang dimaksud adalah daya jangkauan layanan. Kesemuanya ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam melakukan perbaikan layanan publik termasuk masyarakat yang berfungsi sebagai pelanggan layanan publik. Oleh sebab itu, survey ini juga merupakan opini publik terhadap layanan yang diberikan selama ini.

Opini publik dimaksud disusun sampai dengan mendapatkan indeks, kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Tujuan

Survey ini bertujuan untuk memperoleh informasi terukur indeks kepuasan masyarakat (Pemustaka) dalam memperoleh informasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya hasil survey berguna bagi:

- a. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka dan penerima manfaat jasa layanan lainnya.
- b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna ;
- c. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

4. Metode Survey

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Survey ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer secara online melalui alamat <https://s.id/SKMWSB2022> sejumlah 169 kuisisioner kepada pemustaka, agar penelitian ini dapat memberikan gambaran yang cukup refresentatif, maka cakupan (populasi) survey hanya adalah anggota perpustakaan yang aktif mengunjungi perpustakaan.

5. Tim Survey

Ketua	: Asiah, S.IP.
Sekretaris	: Yulianto
Anggota	: Ripto Hartanto
	: Agus Musyafak
	: Wahyu Kristiani

6. Jadwal survey

Survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan mulai tanggal 01 Maret s.d 31 Agustus 2022 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.

B. ANALISA

Setelah diperoleh hasil pengolahan data SKM, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari SKM itu sendiri. Analisa masing-masing unsur SKM dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisa Univariat, analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
2. Analisa Bivariat, analisa ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur prosedur dengan unsur waktu pelayanan, atau unsur kompetensi petugas dengan unsur perilaku petugas. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengolahan data SKM tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka SKM), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Teknik analisis Data dilakukan melalui Analisis Data Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat yang objektif dan komprehensif.

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

[illegible]

110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
112	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
113	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
115	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
117	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
118	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
119	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
120	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
121	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
122	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
123	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
124	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
126	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
127	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
128	4	4	3	3	3	4	3	4	4	
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
131	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
132	4	4	4	4	3	3	4	3	4	
133	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
134	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
135	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
136	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
137	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
139	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4
140	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
141	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
142	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
143	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
144	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4
145	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3
146	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
147	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
148	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4
149	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
150	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
151	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
152	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
153	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
154	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
156	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
157	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	3	2	3	4	3	3	3	4	4	
160	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4
161	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4
162	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4
163	3	4	3	4	3	4	4	3	3	
164	3	3	3	4	3	3	4	4	3	
165	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
166	4	4	3	4	4	3	3	4	4	
167	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
168	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
169	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
SNilai /Unsur	583	605	566	662	588	577	595	597	661	

NRR / unsur	3.450	3.580	3.349	3.917	3.479	3.414	3.521	3.533	3.911	
NRR/unsur (tambahan sub unsur)	3.450	3.580	3.349	3.917	3.479	3.414	3.521	3.533	3.911	
NRR tertbg/ unsur	0.383	0.398	0.372	0.435	0.387	0.379	0.391	0.393	0.435	*) 3.573
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										**) 89.316

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 1/9

NO UNSUR	UNSUR PENILAIAN
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah nilai dari setiap Unsur Penilaian diperoleh dari jumlah setiap unsur penilaian.
- Nilai Unsur diperoleh dari Jumlah masing-masing unsur dibagi jumlah responden (157).
- Unsur tertimbang diperoleh dari Nilai Unsur dibagi jumlah unsur penilaian (9).
- Jumlah Unsur Tertimbang diperoleh dari Jumlah unsur tertimbang.
- Nilai IKM diperoleh dari Jumlah Unsur x 25

Berikut Hasil Nilai Penghitungannya:

- Jumlah nilai masing-masing Unsur =

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
583	605	566	662	588	577	595	597	661

- Nilai masing-masing Unsur =

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
3.450	3.580	3.349	3.917	3.479	3.414	3.521	3.533	3.911

- Nilai masing-masing Unsur Tertimbang =

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
0.383	0.398	0.372	0.435	0.387	0.379	0.391	0.393	0.435

- Jumlah Unsur Tertimbang = 3.573
- Nilai IKM = **89.316**

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,573 \times 25 = 89,316$
- b. Mutu pelayanan "A".
- c. Kinerja unit pelayanan Perpustakaan "Sangat Baik".

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa IKM pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo sebesar 89,316 (Sangat Baik) ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah sudah mencapai nilai ideal dengan predikat atau tingkatan **Sangat Baik**.

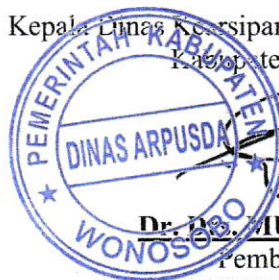
2. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil rekapitulasi saran/pendapat yang disampaikan pemustaka kepada Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 Nilai IKM naik sebesar 0,59 poin.
- b. Dari 169 responden yang diminta saran atau pendapatnya, sebagian besar menyampaikan sudah puas dengan pelayanan di perpustakaan daerah dan sebagian lainnya dari pemustaka menyarankan untuk menambah koleksi bahan pustaka dan ruang bermain anak untuk di perluas serta alat alat permainan edukasi untuk diperbaharui dan diperbanyak variasinya.
- c. Dalam rangka mewujudkan komitmen reformasi pelayanan publik ke arah yang lebih baik, maka survey tentang opini publik dalam hal kepuasan masyarakat atas pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Wonosobo, 24 November 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo



Dr. Hs. MUSOFA, M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP : 196801041997021002

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022**

NILAI IKM

89.316

NAMA LAYANAN : PERPUSTAKAAN DAERAH

RESPONDEN

JUMLAH	:	126	ORANG				
JENIS KELAMIN	:	L	=	37	ORANG	P	= 132
PENDIDIKAN	:	SD	=	1	ORANG		
		SMIP	=	6	ORANG		
		SMA	=	65	ORANG		
		D.III	=	8	ORANG		
		S.1	=	84	ORANG		
		S.2	=	5	ORANG		

Periode Survey= Maret 2022 s.d Agustus 2022

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**